



02 GOVERNMENT TODAY
Mendag Tepis Migor Langka, tapi Akui Harga Naik

05 NUSANTARA
Jatuhnya Helikopter di Sekadau: Seluruh Penumpang Tewas

10 LISTSTYLE
Kosmetik Belum Kedaluwarsa Bukan Berarti Aman, Ketahui Batas Pakainya

REKOR KELAM KETUA OMBUDSMAN TERJERAT KORUPSI DI HARI KEENAM MENJABAT

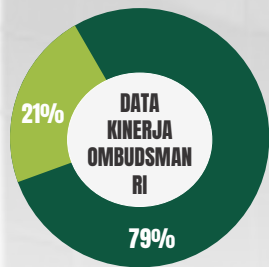
Disahkan DPR Januari, Dilantik Prabowo 10 April 2026 dan Kini Tersangka Korupsi

Dunia pengawasan pelayanan publik dikejutkan dengan kabar penangkapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang baru saja dilantik 6 hari lalu. Pejabat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi ini justru diduga terjebak dalam praktik lancung korupsi. Hery Susanto disebut menerima suap senilai Rp1,5 miliar, terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara tahun 2013-2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menjadikannya tersangka dan langsung menahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (16/4/2026). Di sisi lain, penetapan tersebut bak tamparan keras bagi sistem pemilihan petinggi di lembaga negara independen ini. Diketahui, Hery Susanto resmi dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 April 2026 di Istana Negara. Sebelumnya, Hery terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 27 Januari 2026. Ditarik lebih jauh, nama Hery merupakan salah satu dari total 18 nama yang diajukan pemerintah. Dan bagi Ombudsman, dia bukan orang baru karena telah menjadi anggota sejak 2021. Langkah bagus karena segera tertangkap atau ironi, sebab tak terendus saat seleksi? BACA HAL 11...

KARIR

- Direktur Eksekutif Komunal (2004-2014).
- Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI (2014-2019).
- Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (2016-2021).
- Anggota Ombudsman RI (2021-2026).
- Ketua Ombudsman RI (2026-2031), dilantik 10 April 2026.

Fokus di Ombudsman: kemaritiman, investasi, energi, dan sektor strategis pelayanan publik



Total Laporan (2021-2025)
304 LAPORAN

- Selesai: **239 (79%)**
- Proses: **65 (21%)**

HARTA KEKAYAAN

TOTAL KEKAYAAN
RP 4.17 MILIAR
(LHKPN per 17 Maret 2026)

- Tanah dan bangunan: **Rp 2.35 miliar**
- Kendaraan: **Rp 595 juta**
- Harta bergerak lainnya: **Rp 685,9 juta**
- Kas dan setara kas: **Rp 539,68 juta**



MENDAG TEPIS MIGOR LANGKA, TAPI AKUI HARGA NAIK

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng (migor) di pasaran. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak disertai kelangkaan barang, melainkan dipengaruhi oleh faktor kenaikan biaya produksi, khususnya pada kemasan berbahan plastik.

Dalam keterangannya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4/2026), Budi Santoso menjelaskan bahwa hampir seluruh produk minyak goreng menggunakan kemasan plastik. Lonjakan harga bahan tersebut secara langsung berdampak pada harga jual produk di tingkat konsumen.

“Ya ada sedikit juga yang naik karena kan imbas dari, kan mereka kemasannya plastik semua,” kata Busan, begitu sapaannya.

Meski harga mengalami kenaikan, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk produk MinyakKita di angka Rp 15.700 per liter. Menurut Busan, produsen masih dinilai mampu menanggung harga tersebut, walaupun tekanan dari kenaikan harga bahan baku utama terus terjadi.

Ia menyebutkan bahwa kenaikan



Pedagang menata minyak goreng kemasan plastik. (dok)

harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), yang dipicu oleh konflik geopolitik di Asia Barat, turut memberi tekanan terhadap biaya produksi. Namun demikian, kebijakan HET tetap dipertahankan sebagai langkah menjaga stabilitas harga di pasar.

“Sekarang kan masih bisa. Ya masih bisa, ya memang itu kan fungsinya untuk menstabilkan harga ya biar harga yang lain enggak naik,” tuturnya. Di sisi lain, Busan menegaskan bahwa ketersediaan minyak goreng secara umum masih

HARGA RATA-RATA BAHAN POKOK DI PASAR TRADISIONAL NASIONAL (16 APRIL 2026)

- Bawang Merah Ukuran Sedang
Rp 46.650/kg (-Rp 600)
- Bawang Putih Ukuran Sedang
Rp 40.000 (-Rp 200)
- Beras Kualitas Bawah I
Rp 14.500 (-Rp 50)
- Beras Kualitas Bawah II
Rp 14.550 (Harga Tetap)
- Beras Kualitas Medium I
Rp 16.100 (+Rp 50)
- Beras Kualitas Medium II
Rp 15.950 (+Rp 50)
- Beras Kualitas Super I
Rp 17.350 (+Rp 50)
- Beras Kualitas Super II
Rp 16.850 (+Rp 50)
- Cabai Merah Besar
Rp 46.800 (+Rp 650)
- Cabai Merah Keriting
Rp 45.150 (-Rp 850)
- Cabai Rawit Hijau
Rp 50.700 (-Rp 3.000)
- Cabai Rawit Merah
Rp 74.550 (-Rp 10.100)
- Minyak Goreng Curah
Rp 20.300 (+Rp 150)
- Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1
Rp 23.450 (+Rp 250)
- Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2
Rp 22.550 (+Rp 250)
- Gula Pasir Kualitas Premium
Rp 20.250 (+Rp 100)
- Gula Pasir Lokal
Rp 19.150 (+Rp 50)



Wanti-wanti DPR:

Jaga Stok, Kendalikan Harga Pangan Nasional

ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Eko Wahyudi, meminta pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan stok serta mengendalikan eskalasi harga pangan nasional di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Menurut Eko, gejala internasional dan perubahan iklim berpotensi mengganggu rantai pasok serta meningkatkan biaya produksi dalam negeri. Kondisi ini, jika tidak diantisipasi dengan cepat, dapat berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa harga pangan global pada Maret 2026 tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Lonjakan tersebut dipicu oleh meningkatnya biaya energi, yang tidak lepas dari konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kondisi ini dapat berdampak langsung pada biaya produksi barang tertentu bila pemerintah lambat mengantisipasi eskalasi harga,” ujar Eko dalam keterangannya, Kamis

(16/4/2026) malam.

Meski demikian, Eko mengapresiasi kinerja pemerintah yang dinilai berhasil menjaga ketersediaan pangan nasional, terutama komoditas beras. Ia menyebut, stok beras saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Upaya yang melibatkan Kementerian Pertanian dan para petani disebut sebagai pencapaian penting di tengah situasi global yang tidak stabil.

“Sesuai dengan program strategis Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian, dan para petani Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras, ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan bersejarah, padahal kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, di tengah konflik timur tengah yang bahkan semakin tak

terarah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eko mengingatkan pemerintah untuk bersiap menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai perlu adanya langkah antisipatif melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan serta mitigasi lintas sektor.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain optimalisasi sistem pengairan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, hingga pemanfaatan sumber air alternatif seperti sumur dalam dan dangkal. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengaturan pola tanam dengan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.

Di sisi lain, Eko meminta pemerintah untuk terus memantau perkembangan harga pangan secara intensif. Menurutnya, intervensi kebijakan diperlukan agar lonjakan harga tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha. (wid,rls/dya)

mencukupi di berbagai saluran distribusi, baik pasar tradisional maupun ritel modern. Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak seharusnya hanya berfokus pada satu merek, yakni MinyakKita, dalam menilai kondisi pasokan nasional.

Menurutnya, MinyakKita merupakan bagian dari skema domestic market obligation (DMO), yakni kewajiban produsen untuk memasok sebagian hasil produksinya ke pasar dalam negeri. Karena berasal dari alokasi tersebut, jumlah MinyakKita memang terbatas dibandingkan produk komersial lainnya. “MinyakKita itu kan minyak DMO, minyak DMO dari ekspor jadi jumlahnya terbatas,” ujar Busan.

Ia menilai, persepsi publik yang menjadikan MinyakKita sebagai satu-satunya indikator harga dan ketersediaan minyak goreng justru menimbulkan kesalahpahaman. Ketika stok MinyakKita menipis atau harganya berubah, kondisi itu sering dianggap sebagai kelangkaan secara keseluruhan. (wid,ist,kum/dya)

Prolegnas 2026 Direvisi: Ada 5 RUU Baru

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima rancangan undang-undang (RUU) baru. RUU yang baru masuk meliputi RUU Penyiaran, RUU Profesi Kurator, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta RUU Pelelangan.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menjelaskan bahwa penambahan tersebut merupakan hasil pembahasan lintas lembaga.

"Berdasarkan pembahasan kita baik dari kementerian pemerintah maupun juga PPU DPD RI, Baleg telah menerima usulan tambahan, termasuk satu RUU tentang perumahan dan kawasan permukiman," kata Bob Hasan dalam keterangannya Kamis (16/4/2026).

Diketahui, keputusan ini diambil dalam rapat evaluasi bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) pada 15 April 2026.

Lima RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 meliputi RUU Penyiaran, RUU Profesi Kurator, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta RUU Pelelangan.

RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan



Ketua Baleg DPR, Bob Hasan

status dari usulan pemerintah menjadi inisiatif DPR. Dengan demikian, terdapat empat RUU yang kini berstatus usulan DPR, sementara hanya RUU Pelelangan yang berasal dari pemerintah.

"RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya merupakan usul inisiatif pemerintah kini diubah menjadi usul inisiatif DPR

sekaligus masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026," ujar Bob Hasan.

RUU Pelelangan sendiri merupakan perubahan nomenklatur dari sebelumnya "Pelelangan Aset".

"Tanpa 'aset', jadi cukup 'pelelangan' saja," kata Bob Hasan.

Selain penambahan, DPR dan pemerintah juga menyepakati

5 RUU BARU DALAM PROLEGNAS PRIORITAS 2026

- **RUU Penyiaran**
Mengatur tata kelola industri penyiaran, termasuk konten, perizinan, serta penyesuaian dengan perkembangan platform digital dan media streaming.
- **RUU Profesi Kurator**
Mengatur profesi kurator dalam proses kepailitan dan restrukturisasi utang agar lebih profesional, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
- **RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perubahan UU)**
Memperbarui regulasi lingkungan hidup, terutama terkait pengawasan, sanksi, dan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan di tengah tantangan pembangunan.
- **RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Fokus pada penyediaan hunian layak, penataan kawasan permukiman, serta penguatan peran pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan.
- **RUU Pelelangan**
Mengatur mekanisme lelang secara lebih komprehensif (tanpa spesifik "aset"), termasuk transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum dalam proses pelelangan.



Puan: RUU Pemilu Masih Dibahas Elite Partai

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di parlemen masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, menyatakan bahwa komunikasi intensif masih dilakukan dengan para ketua umum partai politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam revisi aturan tersebut.

"Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik," ungkap Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menegaskan bahwa proses pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memberi manfaat luas, khususnya dalam menjamin kualitas pelaksanaan pemilu ke depan.

"Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Di sisi lain, dinamika pembahasan juga berlangsung secara informal lintas fraksi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron,

mengungkapkan bahwa meski belum masuk pembahasan resmi, komunikasi antarfraksi sudah mulai membahas sejumlah isu krusial.

"Secara formal belum dibahas, tapi secara informal tentu kami ada komunikasi," ujarnya.

Salah satu isu yang mencuat adalah besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Sejumlah opsi mulai mengemuka dalam diskusi antarfraksi.

"Isu-isu dan opininya sudah berkembang lah, ada yang 5 persen, 6 persen (parliamentary threshold). Ada yang menetapkan pilihan sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi," kata Herman.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh soal besaran daerah pemilihan (dapil magnitude), dengan berbagai opsi yang tengah dipertimbangkan, mulai dari 4-6 kursi, 4-8 kursi, hingga tetap pada rentang 4-10 kursi.

"Ini adalah pilihan-pilihan yang nanti secara formal akan ditetapkan oleh fraksi-fraksi, apakah itu nanti Pansus, ataukah dibahas di Badan Legislasi, ataukah mungkin dibahas dalam Panja di Komisi II," jelasnya.

Herman menegaskan bahwa seluruh wacana tersebut masih bersifat awal dan belum menjadi keputusan resmi.

"Nanti formalnya kita tunggu sampai pembahasan dalam Panja ataupun dalam Pansus, ataupun di Badan Legislasi," pungkasnya.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar menyatakan kesiapan untuk segera membahas RUU Pemilu apabila memang diperlukan perubahan. Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji, menilai pembahasan sebaiknya tidak ditunda agar tidak mengganggu tahapan pemilu yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Kalau memang mau ada perubahan ya sebaiknya memang segera dimulai pembahasannya," kata Sarmuji. Ia mengingatkan bahwa tahapan pemilu, khususnya terkait rekrutmen penyelenggara, dijadwalkan mulai pada akhir tahun ini. Karena itu, regulasi harus sudah rampung sebelum tahapan berjalan.

"Karena tahapan pemilu itu seharusnya sudah dimulai pada akhir tahun ini, yaitu tahapan untuk merekrut penyelenggara pemilu," ujarnya.wid,ist,kum/dya

perubahan nomenklatur RUU yang telah masuk dalam Prolegnas. RUU Masyarakat Hukum Adat kini disederhanakan menjadi RUU Masyarakat Adat sebagai bagian dari penyesuaian kebutuhan regulasi.

Sementara itu, RUU Narkotika dan Psikotropika yang sebelumnya merupakan inisiatif pemerintah, kini dialihkan menjadi usulan DPR dalam revisi Prolegnas tersebut.

Seluruh hasil kesepakatan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan secara resmi, meskipun jadwal pelaksanaannya belum diumumkan.

Secara umum, revisi Prolegnas Prioritas 2026 mencerminkan upaya DPR bersama pemerintah dalam merespons kebutuhan hukum nasional yang semakin kompleks, mencakup sektor lingkungan hidup, penyiaran, perumahan, hingga tata kelola aset.

Prolegnas sendiri merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (wid,ist,ant/dya)

Kemlu RI: Keberangkatan Haji 2026 Sesuai Jadwal

Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jemaah Indonesia tetap berjalan sesuai jadwal. Meskipun dinamika konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya Teluk Persia, masih berlangsung. Pemerintah menegaskan telah berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah, menyatakan bahwa hingga kini tidak ada perubahan dalam rencana



Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Katrupan (kanan) didampingi Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim (kedua kanan) menunjukkan makanan untuk jemaah selama penerbangan yang ada di pesawat Garuda Indonesia yang akan digunakan untuk armada angkutan haji 1447 H/2026 di hanggar GMF Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (15/4/2026).ist

memberikan imbauan khusus kepada maskapai dan penyelenggara perjalanan haji agar mengutamakan aspek keselamatan dengan menghindari jalur penerbangan di wilayah rawan konflik.

"Belum ada warning, tapi disarankan nanti untuk travel pengelola jemaah hajinya, untuk penerbangan, kalau bisa menghindari wilayah-wilayah konflik," ujarnya.

Hindari Wilayah Konflik

Dalam kesempatan terpisah, Heni juga menegaskan hal serupa terkait jalur penerbangan langsung menuju Arab Saudi.

"Bagi pengelola perjalanan jemaah haji, untuk penerbangannya diusahakan menghindari wilayah-wilayah konflik, mengingat akan ada penerbangan haji langsung ke Jeddah," kata Heni usai taklimat media di Jakarta.

Kemlu memastikan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terus berjalan intensif untuk memantau perkembangan dan mengantisipasi kendala selama pelaksanaan ibadah.m

"Kita saling berkoordinasi, sangat baik. Jadi Kemenhaj juga akan selalu info ke kita kalau misalnya ada update jemaah, terkait perkembangan dan kendala haji," kata Heni.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi tersebut semakin optimal dengan keberadaan Kantor Urusan Haji di lingkungan Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

"Dan sekarang ini sudah ada kantor urusan haji juga di KJRI Jeddah," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa rangkaian keberangkatan haji telah dimulai dari pengiriman petugas pendahulu ke Arab Saudi.

"Jadwal keberangkatan PPIH Arab Saudi tahun 2026 dimulai dengan keberangkatan tim advance pada tanggal 13 April 2026.

Dilanjutkan keberangkatan Daker Bandara dan Daker Madinah pada tanggal 17 dan 18 April 2026," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, petugas daerah kerja (Daker) Makkah akan diberangkatkan secara bertahap pada 22 dan 23 April 2026 guna memastikan kesiapan layanan bagi jemaah di Tanah Suci. Adapun Amirul Hajj dijadwalkan berangkat pada 19 Mei 2026.wid,rls ktn/dya)

BEA CUKAI INGATKAN KETENTUAN ROKOK HINGGA UANG TUNAI JEMAAH

1. Batasan Rokok

- Maksimal: 200 batang per orang
- Jika melebihi: kelebihan akan dimusnahkan

2. Ketentuan Uang Tunai

- Wajib lapor jika ≥ Rp100 juta
- Harus isi formulir deklarasi
- Data dilaporkan ke BI & PPATK

3. Aturan Barang Kiriman

- Maksimal 2 kali pengiriman per musim haji
- Nilai maksimal: US\$1.500 per kiriman
- Lebih dari itu: Bea masuk 7,5% PPN ±11%

4. Syarat Barang

- Harus barang pribadi (termasuk oleh-oleh)
- Bukan barang titipan
- Wajib sertakan identitas (nomor paspor)

5. Ketentuan Teknis Pengiriman Melalui penyelenggara pos (CN/consignment note)

- Ukuran paket maks: 60 x 60 x 80 cm
- Periode kirim: Dari kloter pertama berangkat Hingga 30 hari setelah kloter terakhir pulang

6. Barang Bawaan Penumpang

- Haji reguler: tidak dibatasi (asal wajar)
- Haji khusus: maksimal US\$2.500
- Lebih dari batas: kena pungutan

7. Evaluasi Haji Sebelumnya

- Mayoritas kiriman dapat pembebasan fiskal
- Masih ada yang kirim >2 kali (melanggar aturan)

keberangkatan haji, sebagaimana hasil koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

"So far haji masih on schedule, ya. Keberangkatan kloter pertama tanggal 22, kalau tidak salah ya, 22 April. Ya, pemerintah Arab Saudi masih sesuai rencana awal," ungkap Heni kepada awak media di kantor Kemlu RI,

Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa penerbangan dan keberangkatan jemaah haji tahun ini tetap mengikuti rencana pemerintah Arab Saudi, meski terdapat dinamika konflik yang berdampak pada sejumlah negara di kawasan.

Namun demikian, Kemlu

Bea Cukai Ingatkan Ketentuan Rokok hingga Uang Tunai Jemaah

"Secara subjek mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, secara fasilitas adalah bahwa Jemaah Haji ini diberikan fasilitas pembebasan, biaya masuk maupun pajak ya, biaya masuk PPN, PPH dan pajak-pajak yang lain," kata Cindhe dalam Edukasi Pelayanan dan Fasilitas Kepabebebasan bagi Jemaah Haji secara daring, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, ia menegaskan fasilitas tersebut tetap memiliki batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Untuk barang tertentu seperti rokok, pemerintah memberikan pembebasan namun dengan jumlah terbatas.

"Jadi rokok ini ketika masuk ke Indonesia memang ada pembebasan, tapi pembebasannya terbatas. Kalau untuk sigaret rokok itu batasannya 200 batang," ujar Cindhe.

Ia menambahkan, kelebihan dari jumlah tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam negeri.

"Jadi nanti ketika jumlah haji pulang dari Arab Saudi ke Indonesia bawa rokok lebih dari 200 [batang], maka kelebihannya akan dimusnahkan," sambungnya.

Selain itu, jemaah juga diminta memperhatikan aturan terkait pembawaan uang tunai. Jika membawa uang dalam jumlah besar, kewajiban pelaporan harus dilakukan.

"Pembawaan uang tunai ketika masuk ke Indonesia memang harus dilaporkan ketika nilainya Rp100 juta atau lebih" ujarnya.

Nantinya, laporan tersebut akan diteruskan kepada otoritas terkait.

"Nanti dari Bea Cukai akan disampaikan kepada BI maupun PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]," pungkasnya.

DJBC juga memberikan kemudahan bagi jemaah dalam membawa atau mengirim barang dari Arab Saudi ke Indonesia. Namun, terdapat sejumlah aturan teknis yang perlu diperhatikan.

Untuk pengiriman barang, jemaah mendapatkan fasilitas maksimal dua kali pengiriman selama satu musim haji, dengan nilai maksimal US\$1.500 per pengiriman.

Jika melebihi batas tersebut, maka akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).(wid,ist rls/dya)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengingatkan sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan jemaah haji Indonesia, baik terkait barang bawaan, kiriman, hingga uang tunai saat kembali ke Tanah Air.

Kepala Seksi Impor 3 DJBC Kemenkeu, Cindhe Marjuang Praja, menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah memberikan berbagai kemudahan fiskal bagi jemaah haji, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang pribadi.

JATUHNYA HELIKOPTER DI SEKADAU: SELURUH PENUMPANG TEWAS

Kecelakaan tragis menimpa helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Seluruh penumpang dan kru yang berada di dalam helikopter tersebut dipastikan meninggal dunia.

Total ada 5,7 juta jemaah haji antre. Gus Irfan menyebut, wacana ini masih dalam tahap kajian dan membutuhkan

DAFTAR PENUMPANG & KRU

- Marindra (pilot) asal Pontianak
- Harun Arasyid (kopilot) asal Pontianak
- Patrick K
- Victor T
- Charles L
- Joko C
- Fauzie O
- Sugito

SPESIFIKASI HELIKOPTER H130 (PK-CFX)

- o **Jenis & Fungsi**
Helikopter ringan Airbus H130
Digunakan untuk transport VIP, survei, patroli, dan misi khusus
- o **Dimensi**
Panjang: 10,68 - 12,64 meter
Tinggi: 3,61 meter
Lebar: 2,31 meter
Diameter rotor: 10,69 meter
- o **Mesin**
Turboshaft Turbomeca Arriel 2D
- o **Performa**
Kecepatan: hingga 237 km/jam
Jarak jelajah: 617 km
Ketahanan terbang: ± 4 jam
- o **Kapasitas**
1 pilot + 6-7 penumpang
Muatan maksimal: hingga 1.500 kg
- o **Penggunaan Global**
Digunakan 290 operator
Beroperasi di 50 negara
Total jam terbang: 1,6 juta+ jam



Penampakan serpihan Helikopter di Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Foto: Dok. SAR Pontianak

pembahasan bersama. Ia memastikan tidak ada rencana penghapusan antrean bagi jemaah yang sudah menunggu lama.

"Jangan khawatir, tidak ada penghapusan antrean. Ini masih wacana panjang dan kita justru mencari solusi untuk mempercepat," ujar Gus Irfan dalam jumpa pers di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Sementara Wakil Menteri Haji dan

Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan percepatan antrean menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Prinsip pertamanya sekarang antrean haji kita itu 5,7 juta orang. Nah, sekarang kami sedang berpikir bagaimana 5,7 juta ini bisa segera berangkat," kata Dahnil.

Menurutnya, masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai hingga 49 tahun kini telah ditekan menjadi

sekitar 26 tahun. Namun, pemerintah masih mencari cara agar waktu tunggu tersebut bisa dipersingkat lagi.

Salah satu wacana yang muncul adalah konsep "war ticket" yang kemudian diistilahkan dengan pendekatan lebih bernuansa Arab, yakni "Fastabiqul Tazkirah".

Dahnil menjelaskan, istilah tersebut bukan sekadar gimmick, melainkan menggambarkan skema kompetisi terbuka bagi jemaah yang sudah memenuhi syarat (istita'ah) untuk bisa berangkat lebih cepat.

"Fastabiqul Tazkirah itu istilah saja. Intinya ada kompetisi, siapa yang mampu. Tapi jangan khawatir, prioritasnya tetap bagaimana mengurangi antrean 5,7 juta itu," ujarnya.

Secara bahasa, Fastabiqul Tazkirah dapat diartikan sebagai "berlomba-lomba dalam peringatan" atau "bersegera dalam memberikan peringatan/edukasi".

Ia menegaskan, skema tersebut tidak akan menghapus hak jemaah yang sudah lama mengantre.

Di sisi lain, pemerintah melihat peluang dari kebijakan jangka panjang Arab Saudi melalui program Saudi Vision 2030. Dalam visi tersebut, Arab Saudi menargetkan mampu menampung hingga sekitar 5 juta jemaah haji per tahun pada 2029-2030.

Jika target itu tercapai, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kuota haji yang signifikan.

"Kalau sekarang kuota kita sekitar 200 ribu lebih, ke depan bisa naik sampai 500-600 ribu. Itu bisa mempercepat antrean dari 26 tahun jadi sekitar 10 sampai 13 tahun," jelas Dahnil. Dengan peningkatan kuota tersebut, percepatan antrean dinilai lebih realistis tanpa mengubah sistem yang sudah berjalan.

Namun demikian, ia mengingatkan peningkatan kuota juga harus diimbangi dengan penguatan tata kelola keuangan haji.

Pemerintah saat ini, kata Dahnil, tengah mendorong reformasi pengelolaan dana haji melalui revisi undang-undang agar manfaatnya lebih optimal bagi jemaah. (wid,ist,kum,ant/dya)

Evakuasi Terkendala Cuaca dan Lokasi Terjal

Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra, menjelaskan temuan tersebut merupakan hasil penyisiran berulang oleh tim udara. "Setelah melakukan searching dan holding dua sampai tiga kali, tim udara menemukan serpihan. Titik awal ini disampaikan oleh Kapten Pilot Puskorma, Abdi Ridho," ujarnya.

Namun, hingga saat ini tim udara belum dapat mendarat di lokasi akibat cuaca yang tidak mendukung. "Tim udara belum bisa turun karena faktor cuaca. Saat ini tim darat sedang berusaha mendekati titik koordinat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii mengungkapkan titik koordinat awal hilangnya kontak helikopter berada di 0°10'51.91 s - 110°47'25.49 e. Sementara sinyal darurat dari Emergency Locator Transmitter (ELT) terdeteksi di koordinat 0°12'0.00"s - 110°44'0.00"e, dengan datum di

0°11'30.39"s - 110°45'43.72"e.

Menurut Syafii, lokasi kejadian secara administratif berada di sekitar Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Area tersebut memiliki karakteristik medan yang cukup ekstrem.

"Kondisi medan lokasi jatuhnya atau hilangnya kontak berada di kawasan hutan rimbun dengan topografi perbukitan terjal," kata Syafii dalam keterangan tertulisnya.

Upaya pencarian juga sempat dilakukan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI AU yang diberangkatkan pada pukul 13.10 WIB menuju titik hilang kontak. Dalam operasi tersebut, tim berhasil mengidentifikasi serpihan helikopter dari udara. (wid,kum,rls/dya)



PROSES evakuasi helikopter PK-CFX milik PT Matthew Air yang jatuh di wilayah Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, masih menghadapi berbagai kendala. Selain faktor cuaca, kondisi medan yang berat turut memperlambat upaya tim gabungan untuk mencapai titik lokasi.

Tim SAR sebelumnya telah menemukan indikasi lokasi jatuhnya helikopter melalui pemantauan udara. Serpihan yang diduga bagian ekor helikopter terdeteksi di kawasan hutan Dusun Hulu Peniti setelah dilakukan pencarian intensif dari udara.

Lokasi serpihan diduga ekor helikopter yang hilang kontak dan jatuh di Sekadau, Kalbar. (Dok. Antara)



DPRD Kabupaten Malang Usulkan Penggabungan Dinas untuk Efisiensi

MALANG - APBD Kabupaten Malang mulai terdampak program efisiensi. DPRD mengusulkan penggabungan sejumlah perangkat daerah atau dinas-dinas yang dinilai memiliki kesamaan fungsi.

Anggota fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, menegaskan penggabungan difokuskan pada dinas-dinas yang memiliki irisan tugas kuat. Menurutnya, selama ini masih ditemukan potensi tumpang tindih program yang berujung pada inefisiensi anggaran.

"Penggabungan ini bukan sekadar merampingkan struktur, tetapi memastikan tidak ada lagi duplikasi program yang membebani APBD," ujar Redam, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Diketahui, sorotab terhadap efisiensi belanja daerah ini telah mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Usulan tersebut menjadi bagian dari agenda penataan

birokrasi yang lebih ramping, adaptif, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu usulan utama adalah penggabungan Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) ke dalam rumpun besar Dinas Pertanian dan Hortikultura. Saat ini, sektor pertanian sendiri berada di bawah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP).

Redam menilai, integrasi tersebut akan menciptakan sistem pangan yang lebih terkoordinasi dari hulu hingga hilir. Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah ini juga dinilai mampu memangkas birokrasi yang berlapis.

"Dengan satu rumpun besar, kebijakan pangan akan lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Tak hanya sektor pangan, Redam juga mengusulkan penggabungan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) ke dalam Dinas Sosial. Kedua lembaga ini dinilai memiliki

irisasi fungsi yang erat dalam pelayanan perlindungan sosial.

Dikatakannya, integrasi tersebut justru akan memperkuat intervensi sosial yang lebih terpadu dan responsif terhadap kelompok rentan. "Pendekatan perlindungan sosial akan lebih komprehensif jika berada dalam satu sistem layanan," jelasnya.

Usulan lainnya menyorot Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) yang direncanakan digabung ke dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penggabungan ini dinilai relevan karena keduanya sama-sama bergerak dalam penanganan kondisi darurat.

Redam menyebut, integrasi Damkar dan BPBD akan



Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara. (foto: ist)

meningkatkan kecepatan respons di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antartugas dalam situasi krisis. "Karakter tugasnya sama, sehingga akan lebih efektif jika berada dalam satu komando," katanya. (Santi/Dya)

Pasar Sawojajar Bakal Disulap Jadi Sentra Kuliner bagi Puluhan UMKM



Kondisi Pasar Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (16/4/2026). (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mewacanakan pengembangan Pasar Sawojajar menjadi sentra kuliner. Melalui konsep tersebut, pasar tradisional ini ditargetkan mampu menampung puluhan UMKM di Kota Malang.

"Iya, seperti pasar wisata. Memang kami berharap bisa meniru pasar yang lain seperti Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar Kasin, Pasar Klojen," ujar Kepala

Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Ni Luh Eka Wilantari, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, potensi pengembangan tersebut didukung dengan ketersediaan ruang yang masih belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya di lantai dua Pasar Sawojajar. Area tersebut yang akan ditata menjadi pusat aktivitas kuliner yang diisi oleh pelaku UMKM.

"Apalagi di atas itu masih ada space kosong, di lantai dua itu. Konsepnya kami ingin fungsikan untuk kuliner," jelasnya.

Meski demikian, Eka menegaskan konsep tersebut masih dalam tahap wacana. Saat ini, Diskopindag masih memprioritaskan pemenuhan standar pasar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bagian dari upaya pembenahan pasar tradisional.

Jika rencana tersebut terealisasi, lantai 2 Pasar Sawojajar diperkirakan mampu menampung puluhan pelaku UMKM kuliner. Diskopindag menyebut angka sementara sekitar 30 pelaku usaha, meski jumlah tersebut masih dapat berubah tergantung jenis dagangan yang dijual.

"Mungkin bisa sekitar 30-an UMKM kuliner. Tetapi nanti tergantung jenis jualannya. Kalau misalkan hanya kue-kue, makanan ringan, itu kan butuh space yang lebih kecil," paparnya.

Lebih lanjut, pelaku UMKM yang akan dilibatkan diprioritaskan berasal dari kawasan sekitar pasar, seperti wilayah Sawojajar dan Purwantoro. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memberdayakan pelaku usaha setempat.

Di sisi lain, Diskopindag juga tengah melakukan penataan terhadap pedagang yang ada di Pasar Sawojajar. Dari total kapasitas 172 pedagang, tercatat sekitar 152 pedagang aktif, sementara sekitar 20 lainnya tidak

beroperasi.

"Jumlah kapasitasnya 172. Tetapi yang aktif di sekitaran 152-an. 20-an nggak aktif," ungkap Eka.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lapak, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pedagang yang tidak aktif. Apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada aktivitas jual beli, izin penggunaan lapak akan dicabut dan dialihkan kepada pedagang lain.

"Yang tidak aktif sekian bulan, akan kami tarik izinnya, kami akan mencari pengganti nanti yang mau jualan," tegasnya.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pasar tetap hidup dan mampu menarik minat pengunjung. Eka menilai keberadaan pedagang aktif menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pasar yang dinamis.

"Karena kami butuhnya mereka aktif jualan meramaikan pasar. Daripada ditelantarkan bedaknya," tambahnya. (Santi/Dya)

DALAM NEGERI AS MEMANAS

TRUMP ANCAM PECAT KETUA FED, DEMOKRAT USUL MENHAN DIMAKZULKAN

Ketegangan politik di Amerika Serikat (AS) kian meningkat setelah Donald Trump mengancam akan memecat Ketua Federal Reserve Jerome Powell jika tak segera mundur. Ini di tengah polemik suku bunga dan penyelidikan hukum yang menjeratnya. Di saat bersamaan, kubu Partai Demokrat menggulirkan upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth terkait keputusan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Ketegangan politik di Amerika Serikat kian meningkat setelah Presiden Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras terhadap Ketua Federal Reserve



Presiden AS Donald Trump geram atas laporan New York Times yang menyebut Iran menang perang. Trump klaim militer Iran hancur lebur dan tuntutan permintaan maaf. (Foto: EPA-EFE)

Jerome Powell. Trump menegaskan akan memecat Powell apabila tetap bertahan setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada 15 Mei mendatang.

Dikutip dari laporan AFP, Kamis (16/4/2026) Powell memang masih memiliki kemungkinan tetap berada di posisi tersebut apabila belum ada pengganti yang dikonfirmasi. Namun,

situasi menjadi rumit karena Powell sebelumnya menyatakan tidak akan meninggalkan jabatannya sebagai gubernur bank sentral sebelum penyelidikan Kementerian Kehakiman terhadap dirinya rampung secara transparan.

"Saya akan memecatnya jika dia tidak pergi tepat waktu," kata Trump. Ia bahkan menegaskan kembali sikapnya dengan pernyataan, "Saya ingin memecatnya."

Dalam setahun terakhir, Trump berulang kali melontarkan kritik terhadap Powell, terutama terkait kebijakan suku bunga yang dinilai tidak cukup agresif. Tekanan terhadap bank sentral juga diperkuat dengan penyelidikan terhadap Powell terkait pembengkakan biaya renovasi serta upaya menggulingkan pejabat lain seperti Lisa Cook.

Trump telah menunjuk mantan bankir, Kevin Warsh, sebagai kandidat pengganti Powell. Namun, proses ini tidak mudah karena harus melalui persetujuan Senat AS. Warsh dijadwalkan menjalani uji kelayakan di Komite Perbankan Senat, tetapi menghadapi hambatan politik setelah sejumlah anggota parlemen menilai penyelidikan terhadap Powell sarat tekanan politik.

Salah satu anggota Partai Republik, Thom Tillis, bahkan menyatakan akan menunda proses konfirmasi hingga penyelidikan selesai. Meski demikian, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, tetap optimistis.

"Saya sangat optimistis bahwa Kevin Warsh akan menjadi ketua The Fed tepat waktu," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat mendukung Warsh untuk mulai menjabat pada 16 Mei.

Di tengah polemik tersebut, dinamika politik domestik AS semakin memanas setelah kubu Partai Demokrat di DPR mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Langkah ini dipimpin oleh anggota DPR dari Arizona, Yassamin Ansari, yang menuduh Hegseth melakukan pelanggaran serius, termasuk melancarkan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

"Saya telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena melanggar sumpahnya, membahayakan personel-personel militer AS, dan melakukan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil dan sekolah perempuan di Minab, Iran," tulis Ansari.

Ia menegaskan, tindakan tersebut melanggar prinsip dasar konstitusi. "Hanya Kongres yang dapat mendeklarasikan perang; tindakannya menuntut pemecatan segera," tegasnya. (wid,afp,rtr,ist/dya)

PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER

Tentara

Iran : 873.000 Personel
AS : 2.141.900 Personel

Kekuatan Darat

Kendaraan Tempur Lapis Baja
Iran : 2.345 unit
AS : 39.223 unit

Tank

Iran : 1.634 unit
AS : 6.287 unit

Artileri

Iran : 2.128 unit
AS : 864 unit

Peluncur Roket

Iran : 1.900 unit
AS : 1.056 unit

Kekuatan Laut

Kapal Perusak	Kapal Selam
Iran : 0 unit	Iran : 34 unit
AS : 68 unit	AS : 38 unit

Kapal Fregat	Kapal Induk
Iran : 6 unit	Iran : 0 unit
AS : 22 unit	AS : 24 unit

Kekuatan Udara

Pesawat Tempur	Pesawat Serang
Iran : 142 unit	Iran : 165 unit
AS : 2.362 unit	AS : 2.831 unit

Helikopter Tempur	Helikopter Angkut
Iran : 12 unit	Iran : 126 unit
AS : 971 unit	AS : 5.760 unit

The New York Times Sebut Iran Menang

narasi tidak sesuai fakta.

Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa kondisi Iran justru telah mengalami kehancuran besar secara militer. Ia menilai pemberitaan tersebut sebagai bentuk disinformasi.

"Bagi mereka yang masih membaca The Failing New York Times, meskipun Iran sudah benar-benar DIHANCURKAN secara militer maupun yang lain, Anda akan mengira Iran sebenarnya menang. Itu tidak benar, dan The New York Times tahu itu BERITA PALSU!" tulis Trump.

Tak hanya membantah, Trump juga mendesak media tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf. Ia menilai pemberitaan itu merugikan dirinya, para pendukungnya, serta negara.

"Kapan media korup ini meminta maaf atas kebohongan dan tindakan mengerikan mereka terhadap saya, para pendukung saya, dan Negara kita sendiri! Apakah mereka tidak punya rasa malu?" cetusnya.

Kontroversi ini bermula dari sejumlah analisis yang menyebut Iran meraih keuntungan strategis dalam konflik tersebut. Salah satu laporan menilai bahwa kemampuan Teheran bertahan dari serangan besar sudah dapat dianggap sebagai bentuk kemenangan.

Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah analisis kebijakan luar negeri. Mereka menilai posisi Amerika Serikat berada dalam tekanan strategis, meskipun secara taktis mungkin meraih keberhasilan di lapangan.

Seorang analis dari Center for Strategic and International Studies menyoroti efektivitas strategi Iran yang menggabungkan daya tahan dan kemampuan menimbulkan kerugian bagi lawan.

"Teheran telah memastikan bahwa bahkan kampanye yang sukses secara taktis pun membawa kerugian strategis yang signifikan bagi Washington," tulisnya. (wid,ist,new/dya)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump kembali terlibat konflik terbuka dengan media arus utama setelah muncul laporan yang menyebut Iran berada di posisi unggul dalam perang melawan koalisi AS dan Israel. Kali ini, kritik keras diarahkan kepada The New York Times yang dinilai membangun

Berat Badan Ideal dengan Chrononutrition Bukan Menu, Tapi Pilihan Jam Makannya

Selama puluhan tahun, perdebatan mengenai penurunan berat badan selalu berputar pada dikotomi "apa" dan "berapa banyak" yang kita makan. Namun, gelombang riset terbaru di bidang nutrisi kini mengarahkan lampu sorot pada dimensi yang sering kita abaikan yaitu "kapan".

Sains mulai membuktikan bahwa tubuh manusia bukanlah sekadar kalkulator kalori yang bekerja 24 jam dengan cara yang sama, melainkan sebuah sistem biologis yang sangat bergantung pada waktu.

Sebuah studi mendalam yang dirilis oleh Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) memberikan bukti empiris bahwa mengatur jendela waktu makan--terutama dengan makan lebih awal dan memperpanjang puasa malam--merupakan faktor penentu dalam menjaga Indeks Massa Tubuh (BMI) tetap rendah. Temuan ini menegaskan bahwa untuk mencapai tubuh ideal, kita harus belajar bekerja sama dengan jam biologis kita sendiri.

Metabolisme dan Ritme Sirkadian

Penelitian yang melibatkan lebih dari 7.000 partisipan dewasa ini membedah hubungan antara kronotipe (jam internal tubuh) dengan efisiensi metabolisme. Tubuh kita diatur oleh ritme sirkadian, sebuah siklus internal 24 jam yang tidak hanya mengatur kapan kita tidur, tetapi juga kapan organ pencernaan kita bekerja paling optimal.

Hasil studi menunjukkan bahwa mereka yang menyelaraskan asupan nutrisi dengan cahaya matahari, yakni makan saat hari masih terang dan berhenti saat malam tiba, memiliki metabolisme yang jauh lebih efisien. Hal ini dikarenakan sensitivitas insulin dan kemampuan tubuh membakar lemak berada pada puncaknya di pagi

hingga sore hari. "Kami menemukan bahwa memperpanjang puasa malam dapat membantu menjaga berat badan jika diikuti makan malam dan sarapan lebih awal," papar Luciana Pons-Muzzo, peneliti dari ISGlobal.

Pons-Muzzo menekankan bahwa pola ini bukan sekadar soal membatasi asupan, melainkan memberi kesempatan bagi tubuh untuk melakukan regenerasi seluler di malam hari tanpa terganggu oleh proses pencernaan yang berat.

Perilaku Sehat dan Korelasi Gender

Menariknya, studi ini juga menemukan bahwa waktu makan merupakan cerminan dari keseluruhan kualitas gaya hidup seseorang. Terdapat perbedaan pola yang cukup tajam antara pria dan wanita dalam menjaga konsistensi ini. Partisipasi perempuan secara umum ditemukan lebih disiplin dalam mengikuti pola diet sehat seperti diet Mediterania, yang secara alami berkontribusi pada angka BMI yang lebih rendah.

Di sisi lain, penelitian mencatat bahwa pria yang memiliki kebiasaan makan lebih siang atau sering mengonsumsi makanan berat di larut malam, cenderung memiliki keterkaitan dengan gaya hidup yang kurang sehat lainnya.

Hal ini mencakup kurangnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi alkohol dan rokok. Data ini menunjukkan bahwa seseorang yang mampu mengatur waktu makannya dengan baik, biasanya juga memiliki kesadaran kesehatan yang lebih tinggi pada aspek kehidupan lainnya.

Kekeliruan Strategi Melewatkan Sarapan

Salah satu poin paling krusial yang disoroti dalam riset ini adalah evaluasi terhadap tren intermittent fasting

yang keliru. Banyak orang mengira bahwa dengan melewati sarapan dan hanya makan di siang hingga malam hari, mereka bisa memangkas berat badan. Namun, data menunjukkan hasil sebaliknya.

Pada kelompok partisipan pria yang melewati sarapan dan baru mengonsumsi makanan pertama mereka setelah pukul 14.00, tidak ditemukan manfaat penurunan berat badan yang signifikan.

Justru, kelompok ini cenderung mengalami lonjakan nafsu makan di malam hari yang memicu konsumsi kalori berlebih. Peneliti menyimpulkan bahwa melewati sarapan bukanlah strategi yang efektif atau berkelanjutan untuk menjaga berat badan dalam jangka panjang.

Mengenal Chrononutrition

Seluruh analisis ini berakar pada bidang chrononutrition, sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana waktu asupan makanan berinteraksi dengan metabolisme. Ketika kita makan di waktu yang salah.

Misalnya makan besar sesaat sebelum tidur, kita sedang memaksa sistem pencernaan bekerja saat tubuh seharusnya masuk ke fase pemulihan. Gangguan ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang berujung pada penumpukan lemak dan

risiko gangguan kesehatan jangka panjang. Pada akhirnya, menjaga berat badan ideal bukan berarti harus terjebak dalam diet ekstrem yang menyiksa. Kuncinya terletak pada moderasi dan ketepatan waktu. Dengan memajukan jam makan malam dan memberikan jeda yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat hingga sarapan esok harinya. (Ist/dya)



Panduan Jam Makan Chrononutrition:

Sarapan (06.00 - 09.00): Sebaiknya dimakan segera setelah bangun tidur untuk mengaktifkan metabolisme, seringkali direkomendasikan sarapan yang kaya nutrisi untuk memulai energi harian.

Makan Siang (11.00 - 14.00): Waktu terbaik untuk konsumsi makanan terbesar dan tercukupi, karena metabolisme sedang aktif bekerja, memungkinkan karbohidrat dan lemak diproses dengan optimal.

Makan Malam (18.00 - 20.00): Makanlah paling lambat pukul 19.00-20.00 atau 2-3 jam sebelum tidur. Porsinya harus lebih ringan dibanding siang hari untuk memudahkan pencernaan dan menghindari penumpukan lemak.

Camilan (10.00-11.00 & 15.00-16.00): Diperbolehkan jika perlu, sebaiknya memilih buah atau camilan rendah kalori, terutama jika ada jeda panjang antar waktu makan besar. (*)

Masih Hujan Kala El Nino Godzilla Mengancam, Ada Apa?



Fenomena hujan deras yang masih mengguyur sejumlah wilayah Indonesia di tengah ancaman kemarau panjang akibat El Nino menimbulkan kebingungan di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan, apakah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meleset?

Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sonni Setiawan, menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika iklim yang sedang berada dalam fase transisi.

"Ini bukan berarti prediksi BMKG salah, tetapi memang ada proses peralihan musim yang menyebabkan

hujan masih terjadi di beberapa wilayah," ujarnya.

Sinyal Kemarau Panjang Sudah Terlihat

Sonni mengungkapkan bahwa indikasi kemarau panjang tetap terdeteksi, terutama dari kenaikan suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur.

Kondisi ini merupakan tanda berkembangnya fenomena El Nino yang berpotensi menurunkan curah hujan secara signifikan di Indonesia. "Musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih lama, sekitar enam bulan," jelasnya. Tak hanya itu, awal musim kemarau juga

diprediksi datang lebih cepat, khususnya di Pulau Jawa yang biasanya memasuki musim kering pada Juli.

Apa Itu El Nino Godzilla?

Istilah "El Nino Godzilla" merujuk pada kategori super El Nino, yakni ketika suhu muka laut meningkat hingga 2,5 derajat Celcius atau lebih di atas normal.

Fenomena ekstrem ini pernah terjadi pada tahun 1982, 1997, dan 2015, yang berdampak pada kekeringan parah serta kebakaran hutan di Indonesia. Meski begitu, Sonni menilai kondisi saat ini belum mencapai level yang

mengkhawatirkan.

Ada Kaitan dengan Aktivitas Matahari?

Menariknya, penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara kekuatan El Nino dengan aktivitas bintik matahari (sunspot). Berdasarkan data selama 35 tahun, El Nino kuat cenderung terjadi setelah fase maksimum sunspot. "Sunspot maksimum tahun 2025 berpotensi diikuti El Nino kuat pada 2026," tambah Sonni.

Namun, ia menegaskan bahwa temuan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keterkaitannya secara ilmiah. (Nabilla - mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)

Ancaman kesehatan utama yang perlu diwaspadai

1. Heat Stroke (Serangan Panas)

Suhu tinggi (38-40°C) meningkatkan risiko gangguan panas. Heat stroke adalah kondisi darurat saat suhu tubuh melonjak dan keringat berhenti, berpotensi merusak organ hingga fatal.

2. Penyakit Saluran Pernapasan (ISPA)

Paparan debu dan asap dapat menyebabkan ISPA, batuk, pilek, serta memperparah asma hingga sesak napas.

3. Krisis Air Bersih & Penyakit Menular

Keterbatasan air bersih meningkatkan risiko diare dan gangguan pencernaan.

4. Masalah Kulit & Mata

Kulit dapat mengalami iritasi, kering, hingga risiko kanker kulit. Mata rentan merah, gatal, dan iritasi akibat udara kering.



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Kosmetik Belum Kedaluwarsa Bukan Berarti Aman, Ketahui Batas Pakainya

Banyak orang beranggapan produk make up masih aman digunakan selama belum melewati tanggal kedaluwarsa. Namun, anggapan tersebut tidak selalu tepat. Informasi mengenai tanggal akhir saja belum cukup memastikan keamanan penggunaan kosmetik.

Berbeda dengan produk makanan, tidak semua kosmetik mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara jelas pada kemasannya. Sebagian besar produk justru menggunakan keterangan mengenai masa pakai setelah kemasan dibuka sebagai acuan penggunaan.

Oleh karena itu, pengguna perlu memperhatikan informasi tersebut agar produk tetap aman digunakan.

Sebuah produk kosmetik bisa saja masih berada dalam masa kedaluwarsa, tetapi kualitasnya telah menurun karena terlalu lama digunakan sejak pertama kali dibuka. Kondisi ini kerap tidak disadari oleh pengguna.

Mengutip Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, jangka waktu suatu produk tetap aman digunakan dan masih berfungsi dengan baik dikenal sebagai shelf life atau masa simpan.

Masa simpan tersebut dapat berbeda pada setiap produk. Perbedaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis produk, cara penggunaan, serta cara penyimpanannya.

Seiring berjalannya waktu, kosmetik dapat mengalami degradasi atau kerusakan. Hal ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain paparan udara, sinar matahari, perubahan suhu, hingga kontaminasi bakteri yang berasal dari tangan atau

aplikator. Produk yang sering bersentuhan langsung dengan tangan, seperti krim dalam kemasan jar atau maskara dengan sikat aplikator, cenderung lebih mudah terkontaminasi mikroorganisme, termasuk bakteri dan jamur.

Ketika bahan pengawet di dalam produk mulai terurai, risiko pertumbuhan kuman pun meningkat. Selain itu, kosmetik yang digunakan di area mata umumnya memiliki masa pakai lebih singkat karena berpotensi menimbulkan infeksi yang dapat berdampak serius.

Kenali simbol PAO

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui batas penggunaan makeup adalah dengan memperhatikan simbol Period After Opening (PAO). Simbol ini biasanya berbentuk gambar wadah terbuka yang disertai angka dan huruf "M", misalnya 6M atau 12M.

Angka tersebut menunjukkan jangka waktu produk masih aman digunakan setelah pertama kali dibuka. Sebagai contoh, keterangan 6M berarti produk sebaiknya digunakan dalam waktu enam bulan sejak kemasannya dibuka.

Apabila simbol tersebut tidak ditemukan pada botol atau wadah produk, informasi serupa umumnya dicantumkan pada kemasan luar. Namun, kemasan tersebut sering kali sudah dibuang

sehingga pengguna tidak lagi memiliki acuan masa pakainya.

Tanda-tanda makeup sudah tidak layak pakai

Selain mengacu pada simbol, Anda juga perlu memperhatikan perubahan pada produk. Makeup yang sudah melewati masa pakai biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti, Bau berubah atau tidak sedap, Warna menggelap atau menguning (oksidasi), Tekstur mengering, menggumpal, atau terpisah. Tidak lagi menempel atau menyatu dengan baik di kulit.

Makeup yang telah melewati masa pakai berpotensi menjadi tempat berkembangnya bakteri. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan pada kulit maupun area sekitar mata.

Penggunaan kosmetik yang sudah terlalu lama dipakai dapat memicu berbagai masalah, seperti jerawat, ruam, infeksi kulit, hingga infeksi mata, termasuk bintitan.

Produk yang digunakan di area mata menjadi yang paling berisiko karena bagian tersebut tergolong sensitif. Maskara yang mulai mengering, misalnya, sebaiknya segera dibuang.

Produk tersebut tidak dianjurkan untuk dicampur dengan air atau cairan lain karena dapat mempercepat pertumbuhan bakteri.

Berapa lama rata-rata masa pakai makeup?

Mengutip dari Healthline, berikut gambaran umum masa pakai produk makeup yang aman setelah dibuka kemasannya.

Maskara dan eyeliner cair: 3-6 bulan, Foundation dan concealer cair: 12-18 bulan, Lipstik: 18-24 bulan, Lip gloss: 12-18 bulan, Produk krim: 12-18 bulan, Produk berbentuk bubuk: 12-18 bulan

Untuk produk perawatan kulit, kemasan dalam bentuk jar atau dengan pipet umumnya bertahan sekitar sembilan bulan setelah dibuka karena lebih sering terpapar udara dan tangan. (Ella - mahasisesa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)

Tips agar makeup lebih awet dan aman

Agar kosmetik tetap aman digunakan, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

- Jangan berbagi makeup dengan orang lain.
- Cuci tangan sebelum mengaplikasikan produk.
- Bersihkan kuas dan spons secara rutin.
- Simpan makeup di tempat sejuk dan kering, hindari paparan panas seperti di dalam mobil.

Rekor Kelam Ketua ...dari hal 1

Baru beberapa hari setelah dilantik oleh Prabowo Subianto, Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031, Hery Susanto, justru tersandung perkara hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola pertambangan nikel, dengan nilai suap yang ditaksir mencapai Rp1,5 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah penyidik menemukan alat bukti yang dinilai cukup. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Anang Supriatna, menyatakan, "Tim penyidik menetapkan tersangka HS," dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kasus ini disebut berawal dari persoalan yang dihadapi PT TSHI terkait perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan. Dalam upaya mencari jalan keluar, perusahaan tersebut diduga melakukan pendekatan kepada Hery yang saat itu masih menjabat sebagai anggota Ombudsman.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan, Syarif Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa terdapat dugaan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dan Hery untuk memengaruhi kebijakan.

"Bersama dengan HS (Hery Susanto) untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar," ujarnya.

Sebagai imbalan atas peran tersebut, Hery diduga menerima uang dari direktur PT TSHI berinisial LKM. Syarif mengungkap, "Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar."

Dalam konstruksi perkara, dugaan suap itu terjadi pada 2025, saat Hery masih berstatus komisioner Ombudsman. Namun dampaknya baru mencuat setelah ia resmi menjabat sebagai ketua lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Atas perbuatannya, Hery dijerat sejumlah pasal, antara lain Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 606 KUHP. Ia kini ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini menyita perhatian publik bukan hanya karena nilai suapnya, tetapi juga karena timing-nya yang mencolok. Hery baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman pada 10 April 2026 di Istana Negara. Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Namun, belum genap sepekan sejak pengucapan sumpah jabatan, ia

sudah harus mengenakan rompi tahanan. Pada Kamis siang, Hery terlihat digiring keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan dengan tangan diborgol, menuju mobil tahanan.

Sebagai lembaga negara independen, Ombudsman memiliki mandat penting yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, mencegah maladministrasi, serta melindungi hak-hak masyarakat dari praktik penyimpangan oleh aparaturnegara maupun badan usaha.

Ironisnya, sosok yang kini memimpin lembaga tersebut justru terseret dalam dugaan praktik yang bertolak belakang dengan mandat tersebut.

Hery Susanto dikenal memiliki latar belakang panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi. Ia merupakan lulusan doktoral dari Universitas Negeri Jakarta dan pernah menjadi tenaga ahli DPR RI. Dalam kariernya, ia juga aktif di berbagai organisasi masyarakat serta fokus pada isu kemaritiman, investasi, dan energi selama menjabat di Ombudsman sejak 2021.

DPR Mengaku Terkejut

Komisi II DPR RI menyatakan keterkejutan sekaligus penyesalan atas penetapan tersangka terhadap Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031, Hery Susanto, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengaku pihaknya tidak menyangka kasus tersebut menjerat mitra kerja mereka di lembaga

pengawas pelayanan publik itu.

"Kami sangat terkejut. Kami syok dan tentu menyayangkan berita ini," kata Rifqinizamy di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, Komisi II sebagai mitra Ombudsman sebelumnya telah menjalin komunikasi, termasuk diskusi informal. Karena itu, penetapan tersangka terhadap Hery menjadi pukulan yang tidak diduga.

Meski demikian, DPR menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Rifqinizamy juga meminta seluruh anggota Ombudsman RI segera melakukan konsolidasi internal agar fungsi kelembagaan tetap berjalan.

Menurut dia, penting bagi Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik tetap diawasi secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, meski pucuk pimpinan lembaga tersebut tengah menghadapi persoalan hukum. Terlebih, kata dia, jajaran Ombudsman-- termasuk Hery--baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu di Istana Negara.

Rifqinizamy menilai kasus ini harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, khususnya dalam menjaga integritas lembaga negara.

"Mari kita beri waktu proses hukum berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan Komisi II DPR RI tentu menyayangkan hal ini bisa terjadi," ujarnya.

Sementara, Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026–2031 menyampaikan permintaan maaf kepada publik menyusul penetapan tersangka

terhadap Ketua mereka, Hery Susanto, dalam kasus dugaan korupsi.

Dalam pernyataan resminya, ORI mengakui peristiwa tersebut menjadi pukulan bagi lembaga, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kami menyesalkan peristiwa ini terjadi serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas," tulis Pimpinan ORI dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ombudsman juga menegaskan bahwa perkara yang menjerat Hery terjadi pada periode sebelumnya, saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Ombudsman pada 2021–2026.

Di tengah sorotan publik, ORI menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Lembaga tersebut juga memastikan akan bersikap kooperatif dalam setiap tahapan penyidikan.

Komitmen itu, menurut ORI, menjadi bagian dari upaya menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjunjung asas praduga tak bersalah.

Meski pucuk pimpinan tersandung perkara hukum, Ombudsman menegaskan roda organisasi tetap berjalan. Sejumlah langkah internal telah disiapkan untuk memastikan fungsi pengawasan pelayanan publik tidak terganggu.

Kejaksaan Agung memburu pihak yang diduga menjadi pemberi suap dalam perkara yang menjerat Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Sosok tersebut adalah pemilir PT Toshida Indonesia, La Ode Sinarwan Oda. (wid,istkum,tmo/dya)



Suasana di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang tengah digeledah penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).ist

**Kejaksaan Geledah
Dinas ESDM Jatim
soal Dugaan Pungli
Penerbitan Izin**

PENYIDIK Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur di Jalan Tidar, Kota Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Pengegeledahan ini dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono. Dia mengatakan, pengegeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan pungutan liar

(pungli) di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

"Benar terkait dugaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pungli dalam penerbitan perizinan pada dinas ESDM Provinsi Jatim," kata Adnan.

Adnan belum menjelaskan rinci konstruksi perkara dugaan pungli tersebut. Dia menyebut, tim penyidik masih melakukan pengegeledahan

guna mengumpulkan alat bukti.

"Hari ini penyidik melakukan pengegeledahan di kantor dinas ESDM Provinsi Jatim untuk mencari dan menemukan alat bukti yang mendukung baik berupa dokumen/surat maupun BBE," ucapnya.

Belum ada keterangan dari pihak Dinas ESDM Jatim mengenai pengegeledahan ini. (pra,ist/dya)

TNI PERCAYA DIRI MOTIF PENYIRAMAN ANDRIE DENDAM PRIBADI

TNI menyatakan keyakinannya bahwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memiliki motif "dendam pribadi" berdasarkan hasil penyidikan terhadap empat prajurit yang menjadi terdakwa. Meski korban belum sempat diperiksa atau dikroscek karena masih menjalani perawatan intensif, Oditurat Militer tetap melimpahkan berkas perkara ke pengadilan karena menilai alat bukti sudah mencukupi. Padahal, pemeriksaan terhadap Andrie Yunus belum dapat dilakukan hingga saat ini. Namun demikian, proses hukum tetap berlanjut dan kasus tersebut sudah memasuki tahap persidangan pada akhir bulan ini.

Perkembangan terbaru kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mengungkap dua hal penting: dugaan motif pelaku serta pelimpahan berkas perkara ke pengadilan militer meski korban belum sempat diperiksa.

Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, menyatakan bahwa aksi para terdakwa dilatarbelakangi persoalan pribadi



terhadap korban.

"Bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap Saudara A [Andrie Yunus]," kata Andri kepada wartawan

di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci terkait bentuk dendam tersebut. Kesimpulan itu disebut berasal dari hasil berita acara pemeriksaan (BAP)

KontraS Soroti Kejanggalan dan Minim Transparansi

Tindak Kekerasan (KontraS) menilai proses hukum yang berjalan, khususnya di lingkungan militer, masih menyisakan banyak pertanyaan.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengkritik jalannya proses hukum yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen awal TNI untuk membuka kasus secara transparan dan akuntabel.

"Pertanggungjawaban komando dalam struktur BAIS tidak hanya berhenti hanya kepada pertanggungjawaban etik, namun juga sanksi pidana sebagai kepala atau atasan yang mengetahui dan bertanggung jawab (command responsibility) terhadap perilaku dan tindakan prajurit di bawahnya," kata Dimas melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).

Menurut KontraS, hingga saat ini TNI belum mengungkap secara terbuka identitas maupun wajah empat tersangka yang terlibat dalam penyiraman air keras tersebut. Selain itu, hasil penyelidikan internal yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga dianggap

belum menjelaskan secara rinci berbagai temuan yang sebelumnya disampaikan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

Temuan TAUD terkait dugaan keterlibatan lebih banyak pihak juga belum direspons secara memadai. Dalam investigasi mereka, disebut-kan adanya indikasi keterlibatan hingga 16 orang yang diduga terlibat dalam pengintaian, komunikasi, hingga koordinasi sebelum aksi terjadi.

KontraS menilai, tidak diungkapnya dugaan operasi yang lebih luas serta kemungkinan adanya komando struktural menjadi indikator lemahnya transparansi dalam penegakan hukum kasus ini.

Selain itu, pasca-peristiwa penyiraman, KontraS juga mencatat masih adanya intimidasi dan teror terhadap pihak-pihak yang menyuatkan solidaritas kepada korban. Kondisi ini dinilai memperkuat anggapan bahwa praktik kekerasan dan impunitas masih terus berlangsung. (wid,ist,kum/dya)

para tersangka.

Pada hari yang sama, Oditurat Militer II-07 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Pelimpahan ini tetap dilakukan meskipun Andrie Yunus belum dapat diminta keterangan.

Menurut Andri, upaya pemeriksaan terhadap korban sebenarnya telah dilakukan, termasuk melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, kondisi kesehatan korban yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit membuat proses tersebut belum bisa dilakukan.

"Ada penyampaian dari LPSK tersebut bahwa saksi korban belum bisa diminta keterangan sampai dengan beberapa waktu ke depan, dan kami dalam hal ini tahu karena alasan kesehatan," ungkap Andrie saat diwawancarai oleh awak media.

Meski tanpa keterangan korban, pihak oditur menilai unsur pembuktian dalam perkara ini telah terpenuhi. "Bahwa keterangan saksi korban itu memang dibutuhkan sangat, tetapi tidak mutlak. Karena sudah ada alat bukti berupa visum, kemudian para saksi yang melihat, dan juga keterangan dari tersangka," bebernya.

Ia menambahkan, pelimpahan dilakukan demi memastikan proses hukum berjalan cepat dan memberikan kepastian hukum.

"Dan juga kami ingin transparansi serta akuntabel bisa dilaksanakan sehingga tidak ke mana-mana," kata dia. Dalam penyidikan, total delapan saksi telah diperiksa, terdiri dari tiga orang sipil dan lima dari unsur militer. Selain itu, sejumlah barang bukti juga telah diamankan dan diserahkan ke pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain pakaian korban, helm, botol cairan, hingga rekaman video dalam flashdisk yang diduga berkaitan dengan kejadian.

Pelimpahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terhadap empat prajurit yang menjadi terdakwa, yakni NDP (kapten), SL dan BHW (letnan satu), serta ES (sersan dua), yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2026.

Andri juga membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara jika dalam persidangan ditemukan fakta baru, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak sipil.

"Apabila ada di dalam pembuktian di persidangan nanti ada tambah atau bagaimana, nanti tetap akan dilakukan penyidikan kembali. Apabila dia ada tersangka dari sipil, maka akan di-split," kata Andri Wijaya, Kamis (16/4/2026). (eid/bbcist/dya)

KRONOLOGI KASUS ANDRIE YUNUS

12 Maret 2026

- Andrie Yunus diserang air keras di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
- Diduga sudah dibuntuti sejak keluar dari kantor YLBHI.
- Diserang dua orang berboncengan motor Mengalami luka bakar ±20% dan cedera pada mata.

14 Maret 2026

- Ratusan organisasi sipil kecam serangan Kasus jadi sorotan internasional, termasuk PBB.

15 Maret 2026

- Presiden perintahkan pengusutan tuntas.
- Dorong pengungkapan pelaku dan aktor di balik serangan.

16 Maret 2026

- Polisi identifikasi pelaku dari puluhan CCTV
- Muncul dugaan pelaku lebih dari satu kelompok

18 Maret 2026

- TNI tetapkan 4 prajurit sebagai tersangka
- Polisi juga sebut kemungkinan pelaku lebih dari empat orang

25 Maret 2026

- Kepala BAIS TNI mundur dari jabatan
- Andrie jalani operasi intensif di RSCM

30 Maret 2026

- Tim advokasi ungkap dugaan keterlibatan hingga 16 orang
- Komnas HAM mulai dalam kasus

31 Maret 2026

- Kasus dilimpahkan dari polisi ke Puspom TNI
- Langkah ini dikritik sebagai "cacat hukum"

16 April 2026 (Hari ke-33)

- Berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer.
- Motif disebut "dendam pribadi" oleh TNI.
- Korban belum diperiksa, namun kasus tetap lanjut sidang.

MEMASUKI 33 hari sejak serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus dinilai belum terungkap ke publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban